

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.P Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Darwin Ginting, *Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Mamuji, & Soerjono, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Muhamad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Citra Media, 2007.

Perangin Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV, Jakarta, 1994.

-----, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Saleh Adiwinata, *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1*. Remadja Karya CV, Bandung, 1984.

Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1986.

Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukun dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

Wiradiputra R, *Agraria (Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta, 1954.

B. Ketentuan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;

Keputusan Menteri Agraria No. Sk VI/Ka/1962 dimuat di dalam Lembaran Negara No. 2461.

C. Sumber Lainnya

Elfira Permatasari, Habib Adjie, Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan, Variajusticia, Jurnal VOL 14 No (1)*, Universitas Narotama, Surabaya, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, 2018.

Dinas Kehutanan Jawa Barat, Visi dan Misi Dinas Kehutanan Jawa Barat,
<http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1298>, 2019.

Perum Perhutani, Kawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat,
www.perhutani.co.id, 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan Pengadilan Nomor : 43 / Pdt.G/
2013/PN.Im,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>, 2019.